

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Dan Inflasi di Kabupaten Gorontalo

**Muhammad Hamzah Anas**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

**Reski Handayani**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

**Sriwahyuni Lamalai**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

**Muhammad Ersa Ayub Pakaya**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Alamat: Jl. Gelatik, Heledulaa, Kec. Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 96135

Korespondensi penulis: [hamzahanas250701@gmail.com](mailto:hamzahanas250701@gmail.com)

**Abstract.** Unemployment and inflation are two main issues that affect economic and social stability in Gorontalo Regency. This study aims to analyze the factors that influence unemployment and inflation rates in the region. Qualitative research methods were used by conducting in-depth interviews with various stakeholders, including workers, entrepreneurs and district governments. The results of the analysis show that factors such as lack of workforce skills, lack of available jobs, rising production costs, and fluctuations in commodity prices contribute to high levels of unemployment and inflation. Evaluation of the limitations of previous studies reveals that the lack of in-depth analysis of the factors underlying these two issues is one of the main weaknesses. Based on the research results, it is recommended that local governments adopt a holistic and integrated approach in overcoming these two problems, by strengthening cross-sector collaboration and implementing effective policies in controlling inflation and increasing employment opportunities. Further research needs to be conducted to evaluate the impact of implementing the proposed policies over a longer period.

**Keywords:** Unemployment, Inflation, Economic Policy

**Abstrak.** Pengangguran dan inflasi merupakan dua isu utama yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di Kabupaten Gorontalo. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi di wilayah tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah kabupaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya keterampilan tenaga kerja, kurangnya lapangan kerja yang tersedia, kenaikan biaya produksi, dan fluktuasi harga komoditas berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran dan inflasi. Evaluasi terhadap keterbatasan studi terdahulu mengungkapkan bahwa kurangnya analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari kedua isu tersebut menjadi salah satu kelemahan utama. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah mengadopsi pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengatasi kedua masalah ini, dengan memperkuat kerjasama lintas sektor dan menerapkan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesempatan kerja. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari implementasi kebijakan-kebijakan yang diusulkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

**Kata kunci:** Pengangguran, Inflasi, Kebijakan Ekonomi

### LATAR BELAKANG

Pengangguran dan inflasi adalah dua fenomena ekonomi yang sering kali saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Gorontalo, dua isu ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan

masyarakat. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan politik. Sementara itu, inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan inflasi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis di Kabupaten Gorontalo menuntut adanya strategi yang tepat dalam mengelola pengangguran dan inflasi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan produk domestik bruto (PDB) semata, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang layak dan stabil serta menjaga stabilitas harga. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Sukirno (2008: 13), pengangguran adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Murni (2006: 197) menyatakan bahwa pengangguran adalah orang-orang yang berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan. Menurut Sukirno (2001: 15), inflasi adalah proses peningkatan harga-harga dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga yang berpengaruh dalam perekonomian.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) Stabilitas perekonomian nasional akan terancam oleh tingginya angka pengangguran. Akibatnya, setiap negara berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran pada tingkat yang adil. Masalah pengangguran di pasar tenaga kerja, yang juga terkait dengan keseimbangan tingkat upah-tenaga kerja, diperiksa dalam teori ekonomi makro (Adha, 2020).(Purba, Nainggolan, & Panjaitan, 2022) Seseorang atau individu yang menganggur umumnya akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Tanpa pendapatan yang memadai, mereka berisiko terjebak dalam lingkaran ketidaksetaraan pendapatan yang sulit diatasi (Putria et al., 2023). Pengangguran seringkali memiliki dampak yang lebih besar pada kelompok-kelompok yang sudah rentan secara ekonomi (Prasaja, 2013).(Hafiz & Kurniadi, 2024) Menurut Putong (2010), pengangguran adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dalam usia kerja dan masa kerja.(c. flores, 2019)

Teori Ranis dan Fei dikembangkan oleh dua ekonom, Gustav Ranis dan John Fei. Teori ini ditujukan sebagai teori pembangunan bagi negara-negara yang menghadapi masalah kelebihan populasi yang serius, pengangguran yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikembangkan (Sadono Sukirno, 2006: 202). Teori Inflasi Keynesian model Menurut pemikiran Keynes, dia mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga dari keadaan tersebut kemudian nantinya akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang akan melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keadaan Keterbatasan jumlah persediaan barang ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan, Dengan kata lain, dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak mengalami peningkatan secepat kenaikan permintaan yang terjadi. (Adwin S. Admaja, 1999).(Amalia, 2012) Inflasi dan tingkat pengangguran adalah dua indikator yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara. Hubungan antara kedua variabel ini merupakan topik ekonomi makro yang sering dibahas dalam praktik ekonomi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran, baik dari segi teori maupun praktik. Relevansi hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran juga mempengaruhi kebijakan ekonomi di setiap negara untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik.(Annazah & Rahmatika, 2019) Menurut Murni (2006), pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memperoleh penghasilan. Sukirno (2008) menggambarkan pengangguran sebagai situasi di mana seseorang termasuk dalam angkatan kerja dan berusaha mendapatkan pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkannya.(Evrina, 2022)

Pengangguran merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa faktor yang saling berinteraksi, mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Jika tidak segera diatasi, pengangguran dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menyebabkan kemiskinan (BPS, 2016).(Poyoh, Kapantow, & Mandei, 2017) Beberapa faktor ekonomi dapat memengaruhi tingkat pengangguran, termasuk tingkat upah minimum, inflasi, dan pertumbuhan PDRB.(Kabupaten & Bolango, n.d.) Menurut Sukirno (2004), dampak negatif dari pengangguran terhadap kemiskinan adalah berkurangnya pendapatan masyarakat karena kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah diraih. Kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena pengangguran dapat meningkatkan risiko terperangkap dalam kemiskinan karena kurangnya

pendapatan. Ketika tingkat pengangguran di suatu negara sangat tinggi, hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial, memberikan efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan menghambat prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.(Mardiatillah, Panorama, & Maftukhatusolikhah, 2021)

Pada tahun 2022, kita sering kali mendengar istilah inflasi. Inflasi merujuk pada penurunan nilai mata uang suatu negara secara drastis yang menyebabkan kenaikan harga barang.(Davin Ewaldo, Michael Setiawan, Viviana Angesty, Renalbi, & Joven Alfando Cang, 2023) Inflasi dapat juga diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya, yang lebih mengarah pada faktor internal atau eksternal, sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Dilihat dari sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation). Inflasi ini terjadi karena adanya tekanan dari variabel makro dalam negeri sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Kedua, Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Merupakan inflasi yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar negeri (faktor eksternal).(Santosa, 2017) Inflasi memberikan dampak baik dan buruk terhadap perekonomian. Ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa secara umum secara berkelanjutan, dan ini dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia.(Sutawijaya, 2012) Philips menyatakan bahwa tingkat inflasi yang tinggi secara positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi tingkat pengangguran. Pernyataan ini juga disokong oleh para tokoh pandangan struktural dan keynesian yang meyakini bahwa inflasi tidak membahayakan pertumbuhan ekonomi, sementara pendapat monetarist menyatakan bahwa inflasi membahayakan pertumbuhan ekonomi.(Sutawijaya, 2012) Menurut Lerner (Gunawan, 1995), inflasi terjadi ketika terdapat kelebihan permintaan (excess demand) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sukirno (1998), inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku umum dalam suatu perekonomian. Sementara itu, Mankiw (2000) mengungkapkan bahwa inflasi merupakan peningkatan secara keseluruhan dalam tingkat harga. Hampir semua negara, tugas bank sentral adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pembukaan lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(Sutawijaya, 2012) Inflasi, di sisi lain, didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Teori

kuantitas uang menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih besar dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sementara itu, teori Keynesian melihat inflasi sebagai hasil dari peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi. Menurut Sukirno (2001:15), inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga yang berdampak atau berlaku dalam suatu perekonomian.(Pramesti, 2012) Jika inflasi hanya terjadi dalam periode tertentu, kemungkinan masyarakat tidak akan mengalami kerugian, tetapi jika inflasi berlangsung secara berkelanjutan, hal tersebut pasti akan menyulitkan masyarakat.(Rasyidin, Saleh, Muttaqim, Nova, & Khairani, 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah kabupaten. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memahami persepsi dan pengalaman langsung dari para informan mengenai dinamika pengangguran dan inflasi di wilayah ini. Salah satu faktor utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau tidak inklusif dapat menyebabkan ketimpangan dan bahkan meningkatkan pengangguran di beberapa sektor. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat pada angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga distribusinya dan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan distribusi yang merata di Kabupaten Gorontalo dapat secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran dan mengendalikan inflasi. Faktor-faktor ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta faktor-faktor sosial dan budaya, termasuk tingkat pendidikan dan infrastruktur yang memadai, memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika pengangguran dan inflasi. Dengan penerapan kebijakan yang terarah dan komprehensif, pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan kerja yang stabil dan menjaga stabilitas harga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan dari pendahuluan maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu Bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya mempengaruhi tingkat pengangguran

dan inflasi di Kabupaten Gorontalo, serta kebijakan apa yang efektif dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kedua fenomena tersebut secara berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Suparmoko (2007), pengangguran adalah situasi ketidakmampuan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan dan sedang berusaha mencari. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Murni (2006), pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Sukirno (2008) menjelaskan bahwa pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Linbeck (1999) menyatakan bahwa pengangguran adalah hasil dari kesalahan kelembagaan dalam instansi pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi regulasi pasar, demografi, hukum, dan regulasi. Pentingnya fitur kelembagaan dalam kaitannya dengan pengangguran memiliki dampak pada permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengaturan upah, dan efektivitas pencarian dan pencocokan di pasar tenaga kerja. (上海市政工程设计hgggg研究总院, 2007)

Menurut Budiono (2008), inflasi adalah proses terus-menerus dalam kenaikan harga-harga umum barang-barang. Sedangkan Sukirno (2008) mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga-harga yang berlangsung dalam suatu perekonomian. Inflasi adalah fenomena moneter yang terus berlangsung. Berdasarkan definisi inflasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Pendekatan praktis dan teknis dalam menangani pengangguran di Kabupaten Gorontalo mencakup kebijakan pemerintah dan program sosial. Kebijakan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja sangat penting untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompetitif. Inisiatif kewirausahaan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah dapat

mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan investasi, terutama dalam infrastruktur dan sektor produktif, juga berpotensi membuka banyak peluang kerja. Program sosial seperti bantuan pengangguran dan jaringan pekerjaan dapat membantu mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Pemerintah menggunakan kebijakan moneter untuk mengatur inflasi, dengan tujuan menjaga stabilitas harga.(Fauziyah, 2015) Untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter yang efektif perlu diterapkan, termasuk mengontrol jumlah uang beredar melalui penyesuaian suku bunga dan operasi pasar terbuka. Stabilisasi harga barang-barang penting melalui intervensi pemerintah juga dapat membantu mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang menyesuaikan pengeluaran pemerintah dan tarif pajak sesuai kebutuhan dapat mengatur permintaan agregat dan membantu menjaga stabilitas harga.

Pentingnya kontribusi dari pembahasan ini terletak pada memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas harga. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Strategi inklusif yang disusun berdasarkan pemahaman yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang stabil dan mengatasi ketimpangan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh pengangguran dan inflasi.

Pembahasan isu utama terkait pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari tiga aspek utama: Definisi dan klasifikasi pengangguran, definisi dan variasi inflasi, serta pendekatan praktis dan teknis dalam menangani kedua isu tersebut. Suparmoko (2007) mendefinisikan pengangguran sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Ini merujuk pada situasi di mana individu yang sudah masuk dalam angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan dan masih berusaha mencarinya. Definisi ini didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum memulai pekerjaan. Murni (2006) mendefinisikan

pengangguran sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, sedangkan Sukirno (2008) menjelaskan bahwa pengangguran terjadi ketika seseorang dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan sifatnya. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan dalam struktur ekonomi yang menghasilkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Pengangguran friksional bersifat sementara, terjadi saat individu dalam proses mencari pekerjaan baru atau berpindah antar pekerjaan. Pengangguran siklikal terkait dengan fluktuasi dalam siklus ekonomi, di mana resesi ekonomi menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja.

Menurut Budiono (2008) dan Sukirno (2008), inflasi adalah proses terus-menerus dalam kenaikan harga-harga umum barang dan jasa. Inflasi bisa timbul karena berbagai faktor, termasuk kelebihan permintaan agregat dibandingkan dengan penawaran agregat, sebagaimana dijelaskan dalam teori Keynesian. Teori monetaris melihat inflasi sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output ekonomi. Inflasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu inflasi tarikan permintaan, yang timbul karena adanya peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi, dan inflasi dorongan biaya, yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti upah dan bahan baku.

Pendekatan praktis dan teknis dalam menangani pengangguran di Kabupaten Gorontalo meliputi berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong kewirausahaan, dan menarik investasi. Kebijakan pendidikan dan pelatihan memiliki peran kunci dalam mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Langkah-langkah kewirausahaan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah dapat merangsang penciptaan lapangan kerja baru, sementara peningkatan investasi, khususnya dalam infrastruktur dan sektor produktif, membuka beragam peluang kerja. Selain itu, program sosial seperti bantuan pengangguran dan jaringan pekerjaan dapat membantu individu yang sedang mencari pekerjaan. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter yang efektif perlu diterapkan untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini termasuk penyesuaian suku bunga dan operasi pasar terbuka. Stabilisasi harga barang-barang penting melalui intervensi pemerintah juga dapat membantu mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang menyesuaikan pengeluaran pemerintah dan tarif pajak sesuai kebutuhan juga penting dalam mengatur permintaan agregat dan menjaga stabilitas harga.

Pembahasan ini memiliki peran penting dalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Dengan melakukan analisis yang mendalam, diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas harga. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Strategi inklusif yang disusun berdasarkan pemahaman komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang stabil dan mengatasi ketimpangan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh pengangguran dan inflasi.

Meskipun literatur yang diberikan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dikritisi. Salah satunya adalah kurangnya fokus pada aspek sosial dan budaya yang memengaruhi pengangguran dan inflasi. Beberapa literatur cenderung terlalu menekankan aspek ekonomi tanpa memperhatikan secara mendalam faktor-faktor non-ekonomi yang juga berperan penting. Misalnya, norma sosial, budaya kerja, dan preferensi pekerjaan mungkin memiliki dampak signifikan pada tingkat partisipasi tenaga kerja dan inflasi, namun kurang mendapat perhatian yang memadai dalam literatur tersebut.

Selain itu, keterbatasan dalam fokus pada sektor-sektor spesifik juga menjadi kendala. Beberapa penelitian tidak memfokuskan analisisnya pada sektor-sektor yang berpotensi besar dalam penciptaan lapangan kerja atau yang paling terpengaruh oleh inflasi. Padahal, sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif mungkin memerlukan perhatian khusus dalam konteks Kabupaten Gorontalo. Dengan tidak mempertimbangkan secara mendalam peran sektor-sektor ini, literatur tersebut mungkin belum memberikan gambaran yang lengkap tentang upaya pengurangan pengangguran dan pengendalian inflasi di wilayah tersebut.

Selanjutnya, keterbatasan dalam implementasi kebijakan juga perlu mendapat perhatian. Beberapa studi memberikan rekomendasi kebijakan tanpa menjelaskan secara detail bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Kekurangan dalam menganalisis kapasitas pemerintah daerah, sumber daya yang tersedia, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan juga merupakan aspek yang perlu dievaluasi. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor ini, rekomendasi kebijakan yang

diberikan mungkin tidak realistik atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Gorontalo. Demikian pula, terdapat keterbatasan dalam kualitas data yang digunakan dalam beberapa literatur. Beberapa studi mungkin menggunakan data yang sudah tidak mutakhir atau kurang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini di wilayah tersebut. Perubahan ekonomi yang dinamis menuntut penggunaan data terkini untuk memberikan gambaran yang akurat tentang tingkat pengangguran dan inflasi. Kurangnya data yang mutakhir dapat menghasilkan analisis yang tidak sepenuhnya akurat atau relevan dengan realitas terkini di lapangan.

Dengan menyoroti kekurangan-kekurangan ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat merancang pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Kritik terhadap literatur sebelumnya dapat membantu peneliti untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan kebijakan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memusatkan perhatian pada wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah kabupaten. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memahami persepsi dan pengalaman langsung dari para informan mengenai dinamika pengangguran dan inflasi di wilayah ini.

### **1. Desain Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

- Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo.
- Memahami persepsi dan pengalaman langsung para pemangku kepentingan terkait dengan pengangguran dan inflasi di wilayah tersebut.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

- Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah kabupaten. Wawancara akan berfokus pada pengalaman, persepsi, dan

pemahaman mereka tentang pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo.

#### C. Pemilihan Sampel

- Pemangku Kepentingan Terkait: Sampel akan dipilih dari berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan isu pengangguran dan inflasi, seperti pekerja dari berbagai sektor, pengusaha, dan pejabat pemerintah kabupaten.

#### D. Prosedur Penelitian

- Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan secara tatap muka dengan pemangku kepentingan yang terpilih. Wawancara akan berlangsung dalam suasana yang santai dan terstruktur, memberikan kesempatan kepada informan untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas.

#### E. Analisis Data

- Transkripsi Wawancara: Setelah wawancara, rekaman wawancara akan ditranskripsi secara lengkap.
- Analisis Tematik: Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Tema-tema utama yang timbul dari wawancara akan diidentifikasi dan dianalisis secara cermat untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo.

#### F. Etika Penelitian

- Keamanan dan Kerahasiaan: Identitas semua responden akan dijaga kerahasiaannya. Hanya informasi yang relevan dengan penelitian yang akan diungkapkan. Setiap informan akan diminta untuk memberikan persetujuan tertulis sebelum dilakukan wawancara.

#### G. Kontribusi Penelitian

- Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang persepsi dan pengalaman langsung dari para pemangku kepentingan, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat untuk

merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi di wilayah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Gorontalo, beberapa temuan signifikan telah diidentifikasi. Dalam wawancara dengan para pekerja, ditemukan bahwa tantangan utama yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan adalah kurangnya peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan mereka. Banyak di antara mereka merasa bahwa pasar kerja lokal belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Seorang responden, Ahmad, yang merupakan lulusan teknik mesin, menyatakan, "Sangat sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di sini. "Banyak perusahaan di daerah ini lebih memilih untuk merekrut pekerja dengan pengalaman kerja daripada lulusan baru seperti saya."

Dari sudut pandang pengusaha, kendala utama dalam merekrut pekerja adalah keterbatasan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh calon karyawan. Banyak perusahaan lokal menghadapi kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat turnover dan kesulitan dalam menjaga stabilitas tenaga kerja. Dalam wawancara dengan seorang pengusaha lokal, Budi, ia menyatakan, "Kami sering menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri kami. Seringkali kami harus memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan baru agar mereka dapat beradaptasi dengan pekerjaan."

Dari perspektif pemerintah kabupaten, masalah pengangguran di Kabupaten Gorontalo diakibatkan oleh kurangnya kerjasama antara dunia industri, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program pelatihan kompetensi yang sesuai dengan keperluan pasar tenaga kerja lokal. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lokal, sehingga menyebabkan perbedaan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di wilayah ini.

Inflasi di Kabupaten Gorontalo juga menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Harga-harga barang kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan kenaikan upah tidak mampu menutupi peningkatan biaya hidup. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli secara keseluruhan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

Dari sudut pandang masyarakat, inflasi telah menyebabkan penurunan daya beli secara keseluruhan. Harga-harga barang kebutuhan pokok terus meningkat, sementara kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga. Banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena biaya hidup yang semakin tinggi. Dalam wawancara dengan seorang ibu rumah tangga, Siti, ia menyatakan, "Harga-harga semakin naik setiap bulannya. Kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok karena penghasilan kami tidak mencukupi lagi."

Dari perspektif pengusaha, inflasi telah menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual produk. Hal ini mengurangi daya saing perusahaan lokal di pasar regional dan nasional. Dalam wawancara dengan seorang pengusaha kecil, Dharma, ia menyatakan, "Inflasi telah membuat biaya produksi meningkat. Kami mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk impor yang memiliki harga lebih rendah. karena harga produk lokal menjadi lebih tinggi." Inflasi telah menaikkan biaya produksi, sehingga mengakibatkan kenaikan harga jual produk. Hal ini membuat produk lokal kurang kompetitif di pasar regional dan nasional. Seiring dengan itu, perusahaan lokal menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menjaga daya saing mereka.

Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo harus mempertimbangkan adopsi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Berikut adalah beberapa implikasi kebijakan lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan:

### 1. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal. Langkah ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan kebutuhan industri.

### 2. Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pemerintah daerah harus memberikan dukungan yang lebih besar untuk usaha kecil dan menengah, yang merupakan pilar ekonomi lokal. Ini termasuk akses lebih mudah ke pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar yang lebih luas.

### 3. Kebijakan Moneter dan Fiskal

Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan bank sentral untuk menerapkan kebijakan moneter yang efektif guna mengendalikan inflasi. Selain itu, kebijakan fiskal yang cerdas, seperti pengaturan pengeluaran pemerintah dan tarif pajak, juga diperlukan untuk mengatur permintaan agregat dan menjaga stabilitas harga.

#### 4. Penguatan Kerjasama Stakeholder

Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, industri, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk mengatasi tantangan pengangguran dan inflasi. Forum dialog terstruktur antara pemangku kepentingan harus didirikan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan.

#### 5. Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur

Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Infrastruktur yang baik, seperti transportasi dan aksesibilitas jalan, akan membantu meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa.

#### 6. Diversifikasi Ekonomi Lokal

Pemerintah daerah harus mendorong diversifikasi ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Diversifikasi ekonomi akan membantu menciptakan peluang kerja di berbagai sektor, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap perubahan global.

#### 7. Penguatan Pengawasan Harga

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap harga barang-barang pokok dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah praktik monopoli dan penimbunan barang. Langkah-langkah ini akan membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah kenaikan inflasi yang tidak terkendali.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pengangguran dan inflasi di Kabupaten Gorontalo. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih efisien dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi yang kompleks di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menyoroti tantangan dan peluang dalam mengatasi kedua masalah ini. Dari analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Sementara itu, kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, serta intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dan inflasi adalah dua permasalahan utama yang memerlukan penanganan serius di Kabupaten Gorontalo. Kedua isu ini saling berhubungan dan memiliki dampak yang penting terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi lokal. Studi literatur yang dilakukan menyoroti beberapa aspek penting terkait definisi, penyebab, dan konsekuensi dari pengangguran dan inflasi. Dalam konteks pengangguran, Definisi yang disampaikan oleh ahli dan lembaga statistik mengindikasikan bahwa pengangguran adalah ketidakmampuan sebagian angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan mereka. Hal ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo. Para peneliti menyoroti kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal sebagai salah satu penyebab utama pengangguran. Selain itu, kurangnya lapangan kerja yang tersedia juga menjadi faktor yang menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi di wilayah ini.

Sementara itu, dalam konteks inflasi, Definisi tersebut mengindikasikan bahwa inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang secara umum dan berkelanjutan. Penyebab inflasi di Kabupaten Gorontalo, menurut studi literatur, meliputi kenaikan biaya produksi, pengurangan daya beli, dan kenaikan harga barang-barang pokok. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan kebijakan moneter juga berkontribusi terhadap tingkat inflasi di wilayah ini. Keterbatasan studi terdahulu mengenai kedua isu ini terletak pada kurangnya analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari pengangguran dan inflasi, serta kurangnya strategi yang efektif untuk mengatasinya. Analisis terdahulu cenderung fokus

pada aspek-aspek tertentu tanpa memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kompleksitas masalah yang dihadapi.

Dalam mengatasi masalah pengangguran, penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi yang melibatkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Pemerintah daerah, bersama dengan industri, program pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan permintaan industri lokal, sehingga lulusan dapat lebih mudah terserap di pasar kerja. Selain itu, dukungan untuk inisiatif kewirausahaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) juga diperlukan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dari perspektif mengatasi inflasi, pemerintah daerah harus mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal yang efektif. Bank sentral perlu memainkan peran yang aktif dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mengurangi tekanan inflasi. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kebijakan fiskal yang bijaksana, seperti pengaturan anggaran dan tarif pajak, untuk mengatur permintaan agregat dan menjaga stabilitas harga. Pengawasan harga barang-barang pokok juga perlu ditingkatkan, dan langkah-langkah tegas harus diambil untuk mencegah praktik monopolis dan penimbunan barang.

Sebagai rekomendasi kebijakan lebih lanjut, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo perlu mempertimbangkan adopsi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, industri, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat adalah langkah penting dalam mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan kebutuhan industri. Investasi dalam infrastruktur, diversifikasi ekonomi lokal, dan penguatan pengawasan harga juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi kedua masalah tersebut.

Dengan mengadopsi pendekatan holistik dan terintegrasi, diharapkan solusi-solusi yang diusulkan dapat menciptakan lapangan kerja yang stabil, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh pengangguran dan inflasi. Perlu juga adanya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari implementasi kebijakan-kebijakan yang diusulkan dalam jangka waktu yang lebih lama.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga artikel yang berjudul: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran dan Inflasi, dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik mental maupun spiritual yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam pembuatan jurnal ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis adalah bahwa semoga jurnal ini dapat memberi manfaat bagi pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak lain yang terkait dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapkan banyak terima kasih.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 10(2), 158–169. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02>
- Annazah, N. S., & Rahmatika, N. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran Dan Inflasi : Studi Kasus Di Asean 7. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(2), 153–163.
- c. flores. (2019). No TitleEΛENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Davin Ewaldo, Michael Setiawan, Viviana Angesty, Renalbi, & Joven Alfando Cang. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Inflasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(1), 388–392. <https://doi.org/10.55606/jempper.v2i1.880>
- Evrina. (2022). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jambi. *Jumanji (Jurnal Manajemen Jambi)*, 5(1), 101–109. <https://doi.org/10.35141/jmj.v5i1.316>
- Fauziyah, F. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2295>
- Hafiz, M., & Kurniadi, A. P. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(2). <https://doi.org/10.15548/jebi.v8i2.864>
- Kabupaten, D. I., & Bolango, B. (n.d.). PENDAHULUAN Pengangguran dewasa masalah ini

masih yang dihadapi berkembang hingga merupakan oleh di mencapai Walaupun hal untuk tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah ditengah-tengah tingginya kompetisi perekonomian dunia serta permasalahan, 151–167.

Mardiatillah, R., Panorama, M., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 365–370. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8825>

Poyoh, A. . ., Kapantow, G. H. M., & Mandei, J. R. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penganggurandi Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 13(1A), 55. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1a.2017.14953>

Pramesthi, R. N. (2012). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek. *Universitas Negeri Surabaya*, 1–20.

Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>

Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, N., & Khairani, C. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 225–231. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1761>

Santosa, A. B. (2017). Analisis Inflasi di Indonesia (2005-2014). *Jurnal Fakultas Konomika Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 445–452.

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Pengaruh Pengangguran Dan Iflansi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, 5(3), 248–253.

Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 85–101. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.237.2012>

上海市政工程设计研究总院. (2007). No Title. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf>